

KONFLIK KAWASAN PERAIRAN WONG TOBO DAN PERKEBUNAN SAWIT DI KABUPATEN MESUJI

Asnani¹, Rudi Setiawan², Bartoven Vivit Nurdin³

¹Universitas Lampung/Jurusan Sosiologi FISIP,
email: asnani@fisip.unila.ac.id

² Universitas Airlangga, Mahasiswa S3 Ilmu Sosial,
email rudisetiawan@pesatgatra.com

³ Universitas Lampung/Jurusan Sosiologi FISIP,
email bartovenvivit@gmail.com

ABSTRAK

Konflik agraria merupakan isu konflik yang paling banyak terjadi di Kabupaten Mesuji. Pihak yang paling sering bergesekan adalah masyarakat lokal dan pihak swasta / perusahaan. Hal ini disebabkan karena informasi yang terbatas dimiliki masyarakat lokal khususnya terhadap konsep “property right” tanah. Legal formal kepemilikan lahan / tanah yang dikelola perusahaan tertuang secara tertulis yang sangat berbeda dengan masyarakat lokal di kawasan perairan Wong Tobo yang sifatnya tradisi lisan dari generasi ke generasi. Perbedaan ini yang akhirnya memicu gesekan dan kerentanan konflik perbatasan di Kawasan Perairan Kabupaten Mesuji. Oleh sebab itu tujuan penelitian ini adalah melakukan analisis deskriptif kualitatif dan melakukan identifikasi konflik di kawasan perairan Wong Tobo dan perkebunan sawit di Kabupaten Mesuji. Pendekatan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan metode deskriptif. Pengumpulan data melalui wawancara mendalam kepada anggota polisi yang pernah bertugas dan menangani konflik di kawasan perairan di Kabupaen Mesuji berjumlah 5 orang, staf/ karyawan perusahaan perkebunan kelapa sawit 2 orang, dan penjaga kebun orang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Wong Tobo adalah kelompok masyarakat yang berasal dari kampung asli/pribumi yang ada di kawasan perairan diantaranya Kampung Kagungan Dalam, Sri Tanjung, dan Nipah Kuning. Perkebunan kelapa sawit berdiri sejak tahun 1995 di lahan pemerintah dengan HGU. Konflik yang muncul karena “property right” yang tidak jelas antara masyarakat dan perusahaan. Masyarakat di kawasan perairan melakukan tuntutan plasma kepada perusahaan. Dalam risalah masyarakat lokal bahwa kelompok masyarakat merasa memiliki lahan sehingga merasa mungkin untuk menuntut plasma dimana tanah masyarakat dapat diserahkan kepada perusahaan dan dikelola. Akan tetapi dalam pandangan perusahaan merasa tidak pernah ada lahan masyarakat yang dikelola. Sehingga sebagai alternatif untuk menangkap aspirasi masyarakat dimulai dengan Desa Kagungan Dalam yang mengajukan permohonan untuk desain konsep kerjasama plasma. Proses dilakukan dengan formal mulai dari pengecekan kepemilikan sampai pengukuran untuk bisa digarap. Desakan dan tekanan yang kuat untuk memiliki akhirnya menimbulkan kerusuhan pada tahun 2011. Pecahnya konflik tidak dapat diprediksi, akan tetapi polisi sebagai petugas keamanan dan menciptakan penertiban cukup memberikan peran perlindungan agar meminimalisir kerugian dan korban.

Kata kunci: Konflik lahan; Perkebunan; Wong Tobo

1. PENDAHULUAN

Konflik agraria yang terjadi di Kabupaten Mesuji merupakan konflik lama yang belum juga kunjung terselesaikan. Konflik agraria dengan spesifik persoalan perkebunan sawit dengan melibatkan perusahaan dan masyarakat lokal. Konflik ini didasarkan pada meningkatnya kebutuhan lahan untuk kepentingan ekstensifikasi lahan perkebunan kelapa sawit (Mustofa and Bakce 2019). Kepentingan ekonomi yang tinggi menyebabkan tingginya kebutuhan lahan oleh perusahaan, sementara masyarakat lokal (Wong Tobo) tidak semuanya memahami tata batas secara hukum kepemilikan lahan. Salah satu hasil penelitian di daerah lain yang menunjukkan bahwa konflik dengan perusahaan Kelapa Sawit disebabkan karena adanya perampasan tanah oleh perusahaan, masyarakat merasa belum diberikan ganti rugi atau merasa tidak puas dengan ganti rugi rendah yang kemudian menyebabkan terjadinya protes dan perlawanan dari masyarakat lokal (Utari, Zubir, dan Lindayanti, 2021).

Konflik ini muncul akibat berkurangnya atau hilangnya mata pencaharian masyarakat lokal yang merupakan bagian dari dinamika proses pembangunan daerah. Kehadiran investor perusahaan-perusahaan perkebunan memberikan nilai tambah dalam pembangunan daerah. Walaupun berkembangnya perkebunan kelapa sawit di daerah-daerah termasuk Kabupaten Mesuji yang lokasinya dekat dengan kawasan perairan Wong Tobo merupakan dampak bisnis global kelapa sawit. Oleh sebab itu Pemerintah Daerah mengeluarkan kebijakan pengembangan kelapa sawit untuk merespon kebutuhan dunia tersebut (Utari, dkk, 2021).

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melakukan analisis secara deskripsi bagaimana konflik antara masyarakat lokal di perairan Wong Tobo dengan perusahaan Kelapa Sawit di Kabupaten Mesuji.

2. METODE

Pendekatan penelitian ini adalah kualitatif dengan upaya mengungkap makna dan memiliki latar yang bersifat *natural setting* (Rukajat, 2018). Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Mesuji tepatnya disekitar perusahaan perkebunan kelapa sawit yang berbatasan langsung dengan kawasan perairan pemukiman masyarakat lokal (Wong Tobo) sekitar pada bulan November 2021 sampai April 2022. Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer bersumber dari wawancara mendalam, observasi dan focus group Discussion (FGD) yang melibatkan pihak perusahaan dan polisi yang bertugas di kawasan perairan Wong Tobo. Data sekunder digunakan dari jurnal maupun laporan terdokumentasi. Teknik pengumpulan data utama menggunakan teknik wawancara terbuka dengan penentuan sampel adalah *purposive sampling*. Pengelolaan data yang telah dikumpulkan dengan membuat transkripsi hasil lapangan, kemudian melakukan klasifikasi dan menyajikan hasil analisis secara deskriptif.

3. TEMUAN STUDI DAN DISKUSI

Kawasan perairan Wong Tobo merupakan pemukiman masyarakat lokal yang ada di Kabupaten Mesuji. Sementara itu Kabupaten Mesuji sangat erat kaitan sejarah Provinsi Lampung dan Sumatera Selatan yang tidak bisa terlepas. Konflik antara masyarakat lokal Wong Tobo dan perusahaan disebabkan karena tidak jelasnya kepemilikan lahan antara kedua pihak (*property right*). Untuk mengurangi konflik tersebut, maka perlu adanya keterlibatan antar pihak diantaranya aparat pemerintah desa, tokoh adat, aparat keamanan (kepolisian) dan kerjasama dengan perusahaan tersebut. Untuk mengatasi permasalahan ekonomi masyarakat

lokal perlu adanya melibatkan masyarakat sebagai tenaga kerja. Pemerintah daerah dan perusahaan bekerjasama untuk memberikan program atau kegiatan pemberdayaan kepada masyarakat untuk meningkatkan income generative masyarakat setempat dengan memanfaatkan sumber daya alam masyarakat Wong Tobo. Upaya untuk meminimalisir terjadinya korban dan resiko dari terjadinya konflik, keterlibatan aparat keamanan (polisi) sudah terlibat dan memberikan peran perlindungan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ajat Rukajat. 2018. Pendekatan penelitian kuantitatif = Quantitative research approach. Yogyakarta; Deepublish Publisher.
- Mustofa, Riyadi and Riati Bakce. 2019. *Potensi Konflik Lahan Perkebunan Kelapa Sawit*. (Unri Conference Series: Agriculture and Food Security 1:58–66).
- Utari, Sri Rahmi, Zaiyardam Zubir, and Lindayanti Lindayanti. 2021. *Analisa Konflik Perkebunan Kelapa Sawit Di Provinsi Riau Antara Masyarakat Dengan Perusahaan (Studi Tentang PTPN V, PT SRK 1980-2019)*. (NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial 8(2):310–30).